

LAPORAN SINGKAT

KOMISI I DPR RI (BIDANG : PERTAHANAN, LUAR NEGERI, TENTARA NASIONAL INDONESIA, KOMUNIKASI DAN INFORMASI, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, BADAN INTELIJEN NEGARA, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA INFORMASI NASIONAL, LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA)

=====
Tahun Sidang : 2006 - 2007
Masa Persidangan : IV
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR-RI dengan Gubernur Lemhannas dan Sekjen Wantannas
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 09 Juli 2007
Pukul : 09.00 WIB
Pimpinan Rapat : Drs. Theo L. Sambuaga
Sekretaris Rapat : Dra. Damayanti
Tempat : Ruang Rapat Komisi I Gedung Nusantara DPR RI
Acara : 1. Kata Pengantar oleh Ketua Rapat
2. Penjelasan oleh Gubernur Lemhannas dan Sekjen Wantannas
3. Tanya jawab
4. Penutup
Hadir Anggota : orang dari orang Anggota Komisi I DPR RI
Pemerintah : Gubernur Lemhannas, Prof . DR. Muladi, SH dan Sekjen Wantannas, M. Yasin

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Gubernur Lemhannas, dan Sekjen Wantannas, pada hari Senin, tanggal 09 Juli 2007 dengan acara sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI, Saudara Drs. Theo L. Sambuaga dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II KESIMPULAN

1. Komisi I DPR RI menghargai kerja Lemhannas dan Wantannas yang menghasilkan berbagai kajian masalah strategis dan aktual mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungan ini, Lemhannas dan Wantannas perlu mengevaluasi sejauhmana hasil kajiannya dimanfaatkan oleh Presiden, dan apabila tidak digunakan oleh Presiden apa sebabnya, agar kedua lembaga ini dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pembuatan dan hasil kajiannya.
2. Semakin banyaknya lembaga pengkajian nasional, baik dilingkungan Pemerintah maupun non pemerintah akan membuat masukan bagi Pemerintah/Presiden semakin beragam. Untuk itu, Komisi I DPR RI minta Lemhannas dan Wantannas melakukan koordinasi dan sinergi termasuk melaksanakan pengkajian bersama atau dalam bentuk *joint session*, agar dapat menghasilkan kajian yang meningkat kualitasnya dengan metode penyajian rekomendasi yang cermat, sehingga semakin dibutuhkan oleh Presiden.

3. Sikap Pemerintah terhadap para pendukung separatisme di berbagai daerah nampaknya diskriminatif, terhadap eks GAM relatif lunak, sedangkan terhadap pendukung OPM dan RMS cenderung keras dan represif. Oleh karena itu, Komisi I DPR RI minta Lemhannas dan Wantannas agar dapat mengkaji dan memberikan masukan kepada Presiden tentang strategi dan pendekatan yang tepat dalam menangani permasalahan disekitar dukungan terhadap gerakan separatisme, seperti yang berkaitan dengan masalah Papua, RMS dan ex GAM, supaya Pemerintah tidak berstandar ganda dalam menyikapi masalah-masalah itu, serta menegaskan bahwa pembentukan partai lokal di Provinsi NAD tidak boleh menggunakan lambang dan gagasan yang mengusung separatisme karena jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam rangka upaya reformasi birokrasi dan menciptakan *good government*, terkesan Pemerintah belum menemukan strategi yang tepat, sehingga *public services* tidak tercipta sesuai dengan tujuan reformasi. Dalam hubungan ini, Komisi I DPR RI minta Lemhannas dan Wantannas untuk mengkaji serta memberikan masukan mengenai reformasi birokrasi yang memang saat ini sangat dibutuhkan untuk diterapkan oleh Pemerintah dalam segala aspek dan lini birokrasi.
5. Menyurutnya pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila dikalangan elit politik dan ditengah-tengah masyarakat sangat memprihatinkan dan berakibat buruk bagi persatuan dan kesatuan bangsa, pembangunan *nation & character buliding*, serta pembangunan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, Komisi I DPR RI minta Lemhannas dan Wantannas agar membuat kajian dan memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk mengambil langkah-langkah konkrit guna mewujudkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam seluruh program dan kebijakan Pemerintah.
6. Komisi I DPR RI mendorong Lemhannas untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan calon pimpinan yang dewasa ini telah mencakup pimpinan daerah, dengan meningkatkan bobot kurikulum yang menekankan pada kualitas kepemimpinan demokratis, *good governance*, wawasan kebangsaan dan penghargaan terhadap pluralitas, serta otonomi luas dengan memperkuat komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Komisi I DPR RI minta Wantannas untuk mempersiapkan pematapan fungsi, mekanisme dan struktur organisasi WANTANNAS, termasuk menyelenggarakan rapat dengan Presiden selaku ketua Dewan Ketahanan Nasional, mempersiapkan perbaikan posisi dan fungsi Wantannas sejalan dengan ketentuan UU No. 3/Tahun 2002 tentang Pertahanan dan mengkaji kemungkinan untuk memperbaiki ketentuan-ketentuan tentang Wantannas dalam UU No. 3/Tahun 2002 tentang Pertahanan tersebut.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.35 WIB.

KETUA RAPAT,

Drs. THEO I. SAMBUAGA
A-525

**RANCANGAN KESIMPULAN
RAPAT KERJA KOMISI I DPR RI DENGAN
LEMHANNAS & WANTANNAS
SENIN, 09 JULI 2007**

1. Komisi I DPR RI menghargai kerja Lemhannas dan Wantannas yang menghasilkan berbagai kajian masalah strategis dan aktual kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungan ini Lemhannas dan Wantannas perlu mengevaluasi sejauhmana hasil kajiannya dimanfaatkan oleh Presiden, apabila tidak digunakan oleh Presiden apa sebabnya, agar kedua lembaga ini dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pembuatan dan hasil kajiannya.
2. Semakin banyaknya lembaga pengkajian nasional baik dilingkungan Pemerintah maupun non pemerintah, maka masukan bagi Pemerintah/Presiden akan semakin beragam. Untuk itu Komisi I DPR RI minta Lemhannas dan Wantannas melakukan koordinasi dan sinergi termasuk melaksanakan pengkajian bersama atau dalam bentuk *joint session*, agar dapat menghasilkan kajian yang meningkat kualitasnya dengan metode penyajian rekomendasi yang cermat sehingga semakin dibutuhkan oleh Presiden.
3. Sikap Pemerintah terhadap para pendukung separatisme di berbagai daerah nampaknya diskriminatif, terhadap eks GAM relatif lunak, sedangkan terhadap pendukung OPM dan RMS cenderung keras dan represif. Oleh karena itu Komisi I DPR RI minta Lemhannas dan Wantannas agar dapat mengkaji dan memberikan masukan kepada Presiden tentang strategi dan pendekatan yang tepat dalam menangani permasalahan disekitar dukungan terhadap gerakan separatisme, seperti yang berkaitan dengan masalah Papua, RMS dan EX GAM, serta menegaskan bahwa pembentukan partai lokal di NAD tidak boleh menggunakan lambang dan gagasan yang mengusung separatisme karena jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundangan.
4. Dalam rangka reformasi birokrasi yang dewasa ini masih sangat lemah dan upaya menciptakan *good government*, terkesan Pemerintah belum menemukan strategi yang tepat, sehingga *public services* tidak tercipta sesuai dengan tujuan reformasi. Dalam hubungan ini, Komisi I DPR RI minta pada Lemhannas dan Wantannas untuk mengkaji serta memberikan masukan mengenai reformasi birokrasi yang memang saat ini sangat

- dibutuhkan untuk diterapkan oleh Pemerintah dalam segala aspek dan lini birokrasi.
5. Menyurutnya pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila dikalangan elit politik dan ditengah-tengah masyarakat sangat memprihatinkan dan berakibat buruk bagi persatuan dan kesatuan bangsa serta pembangunan & *character buliding*, serta pembangunan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, Komisi I DPR RI minta kepada Lemhannas dan Wantannas agar membuat kajian dan memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk mengambil langkah-langkah konkrit untuk mewujudkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam seluruh program dan kebijakan Pemerintah.
 6. Komisi I DPR RI mendorong Lemhannas untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan calon pimpinan yang dewasa ini telah mencakup pimpinan daerah dengan meningkatkan bobot kurikulum yang menekankan pada kualitas kepemimpinan demokratis, *good governance*, wawasan kebangsaan dan penghargaan terhadap pluralitas, otonomi luas dengan memperkuat komitmen terhadap NKRI.
 7. Komisi I DPR RI minta Wantannas untuk mempersiapkan pemantapan fungsi, mekanisme dan struktur organisasi WANTANNAS termasuk menyelenggarakan rapat dengan Presiden selaku ketua Dewan Ketahanan Nasional serta mempersiapkan perbaikan posisi dan fungsi Wantannas sejalan dengan ketentuan UU No. 3/Tahun 2002 tentang Pertahanan atau mengkaji kemungkinan untuk memperbaiki ketentuan-ketentuan tentang Wantannas dalam UU No. 3/Tahun 2002 tentang Pertahanan tersebut.

Rapat ditutup : Pukul 16.35 WIB

Interupsi Anggota Komisi I DPR RI :

Sidharto : ada 2 poin yang saya ingin sampaikan, *pertama*, yang no. 2 yaitu sikap diskriminatif terhadap OPM, RMS dan GAM, lalu arahnya kepada permintaan kita kepada Pemerintah, supaya pemerintah tidak berstandar ganda dalam menyikapi masalah itu, supaya pemerintah tidak berstandar ganda didalam menyikapi masalah-masalah itu. Jadi harus satu sikap tidak membedakan, itu yang pertama. *Kedua*, ada kalimat, saya tidak lihat yang no. 3 : reformasi demokrasi lalu reformasi birokrasi, tadi kelihatannya tidak nyambung.

Ketua : Jadi reformasi birokrasi saja, tidak ada demokrasi

Sidharto : terimakasih

Ketua : usul dari pak Darto tadi, jadi yang tadi sikap pemerintah terhadap pendukung separatis di daerah tampaknya diskriminatif dan diminta supaya tidak bersifat ganda, tidak berstandar ganda. Saya kira bisa setuju ya.

Ginting : ada satu yang justru hari ini sangat penting kita dengar, adanya keinginan bersama untuk *joint function*, namanya *joint session* forumnya, saya kira itu baik, dicantumkan secara eksplisit bahwa Komisi I DPR RI meng-*endorse* itu.

Lalu yang *kedua*, ada istilah yang mengganggu saya pada butir 2 saya kira, pada lembaga pengkajian pemerintah, lalu lembaga pengkajian LSM. Civil Society Organization itu bukan lembaga pengkajian, diganti saja : lembaga pengkajian non pemerintah. Sebab kalau lembaga pengkajian itu profesional, kalau LSM itu teriak-teriak saja sudah bisa.

Ketua : Baik, terimakasih, tadi saya kira 2 hal yang disampaikan pak sutradara ginting, yang pertama tentang *joint session*, jadi kita dapat mendorong dan menyetujui, untuk itu ditingkatkan terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja dari ke-2 lembaga antara lain melalui *joint session* seperti yang disampaikan tadi, saya kira dapat disetujui ini dan memang berkembang ini. Dan kemudian yang tadi , semakin banyak lembaga nasional baik lingkungan pemerintah maupun non-pemerintah, lebih baik menggantikan LSM saya kira itu juga betul. Dapat disetujui saudara-saudara sekalian.

Bachrum : saya tadi mengikuti bahwa pada pokok-pokok kesimpulan no-2, kita menyampaikan bahwa kita menginginkan sinergi dari Lemhannas dan Wantannas, tapi pada point 4 dan 5 kita memisahkan mereka kembali, masing-masing lembaga ini kita minta untuk mengkaji seperti reformasi birokrasi kita minta Lemhannas dan Wantannas membuat kajian tentang reformasi birokrasi. Demikian juga no-5 , ini kita pisah lagi no. 2 kita minta disatukan tapi no. 4, 5

kita pisah lagi. Ini kesimpulan kita bagaimana ini. Kemudian tambahan kesimpulan mungkin buku itu yang diserahkan tadi juga kita bikin dalam kesimpulan bahwa Komisi I telah menerima buku sebanyak berapa, itu juga masuk dalam kesimpulan, terimakasih.

Ketua : yang terakhir itu sudah termasuk dalam butir 1 itu, menghargai hasil-hasil kajian Lemhannas dan Wantannas, meskipun Wantannas belum menyerahkan, akan disusul. Kedua, yang soal sinergi tadi, dalam masalah pelaksanaan kerja dan fungsinya, harus bersinergi, harus berkoordinasi seperti masukan-masukan yang sampai ke *user*, Presiden berasal dari lembaga-lembaga *think* pemerintah ini supaya fokus, supaya jangan tumpang tindih, itu kira-kira. Nah tetapi yang tadi tidak ada yang dipisahkan Lemhannas dan Wantannas, kecuali pada 2 butir yang terakhir, 1 spesifik kepada Lemhannas karena berbicara tentang peningkatan kualitas pendidikan calon-calon pimpinan sedangkan ke Wantannas, kita menyoroti tentang mekanisme, struktur, pelaksanaan fungsi dari Wantannas itu sendiri. Jadi memang spesifik untuk yang terakhir.